



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh Tim Asistensi dengan Unit Pemilik Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Hasil Asistensi	Saran
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan identifikasi risiko strategis dan operasional Perangkat daerah sebagaimana terlampir;	Disarankan kepada Unit Pemilik Risiko (UPR) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan pemantauan berkala terhadap Register Risiko dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) serta melakukan perbaikan atas penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian apabila ditemukan kondisi yang sudah tidak sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya.
2	Risiko strategis dan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah dianalisa risikonya, menggunakan kriteria skor risiko sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bupati Nomor 900.I.13/414 tanggal 9 Juni 2023 tentang Arah dan Kebijakan Pengelolaan Risiko sebagaimana terlampir;	
3	Risiko strategis dan operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah dievaluasi sesuai status risikonya dan telah dibuatkan Rencana Tindak	

No	Hasil Asistensi	Saran
	Pengendalian sebagaimana terlampir.	

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Wonosari, 17 Juli 2023

Ketua Tim,



Meirina Virayanti, SP

NIP. 19820508 201502 2 001

Pengendali Teknis,



Sugeng, S.Sos.,MAP.

NIP. 19660913 198912 1 002

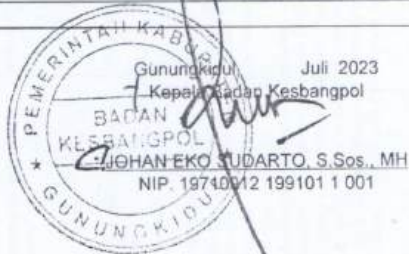


Ketua UPR
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Johan Eko Sudarto, S.Sos.,MH
NIP. 19710912 199101 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul		
Sumber Data	: RPJMD Kab. Gunungkidul, Penstra dan Renja 2024		
Tujuan Strategis	1	Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat	
	2		
Sasaran Strategis	1	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat	
	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	
	3		
IKU OPD		IKU	2024
	1	Presentase Konflik Sosial yang tertangani	91
IKK	1	Presentase Konflik Sosial yang tertangani	91
	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	80,15
	3		
Program	1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
	5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
	7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	1	Tujuan 2.22.08 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat	
	2	Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Masyarakat	
	3	IKU :	
		1. Presentase Konflik Sosial Yang tertangani	
	1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
	5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
	7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	



Identifikasi Risiko Strategis

Nama Pemda Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis		Pemecintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : 2023 : 2024 Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat								
Urusan Pemerintahan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatkan wawasan Kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Indek konflik sosial yg tertangani tahun 2026								
	Sasaran: 1.1. Meningkatnya ketahanan masyarakat	Presentase konflik sosial yg tertangani	Capaian target konflik sosial yang ditangani dalam wilayah kurang optimal	RSO.24.40. 07.01	Kepala Badan	Kurangnya komitmen PD	internal	C	tidak tercapainya target Presentasi Konflik Sosial yang tertangani	Kesbangpol, Pemerintah Daerah
						Kurang pemahamannya masyarakat	eksternal	UC	terganggunya ketentraman dan ketertiban umum	Masyarakat
	Sasaran: 1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	RSO.24.40. 07.02	Kepala Badan	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	internal dan eksternal	C	Nilai evaluasi LKJIP tidak sesuai target	Kesbangpol, Pemerintah Daerah

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY
Tahun Penilaian	:	2024
Periode yang dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Urutan Pemerintahan	:	Urusan
OPD yang Dinilai	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
Sumber Data	:	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Tujuan Strategis	1	Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat
	2	0
Program dan Kegiatan Utama	1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
	5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fa
Keluaran/Hasil Kegiatan		
	Program/Kegiatan	Indikator
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya
	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis budaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan
	Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan pendataan dan pengolahan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlaksana
	Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah layanan penunjang Urusan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada
	Perumusan Kebijakan Teknis dan	Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan	Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap Ketahanan Umat Beragama
	Perumusan Kebijakan Teknis dan	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah
	Perumusan Kebijakan Teknis dan	Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis


 Gunungkidul, Juli 2023
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos., MH
 NIP. 19710912 199101 1 001

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sifat			Tingkat		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Nilai	Uraian	Tingkat	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis budaya	Pelaksanaan	Kurang pemahaman masyarakat tentang pendidikan wawasan kebangsaan dan politik Peserta yang mengikuti kegiatan kurang tepat	ROO.24.40.7.01 ROO.24.40.7.02	Kepala Bidang Kesbang, Sub Koordinator Kepala kesbang, sekretaris, perencanaan dan keuangan, kasubag umum	kurangnya SDM dan pelaksanaan Anggaran dana keistimewaan yang Kurang SDM dan pelaksanaan Anggaran dana Kurangnya SDM dan Kurangnya dukungan anggaran	internal internal	UC UC	kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan wawasan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan tidak berjalan maksimal	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Pelaksanaan	keterlambatan dalam penyampaian dokumen dokumen laporan	ROO.24.40.7.03	Kepala kesbang, sekretaris, perencanaan dan keuangan, kasubag umum	Kurangnya SDM dan Kurangnya dukungan anggaran	internal	UC	keterlambatan penyampaian laporan keuangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	Pelaksanaan	keterlambatan dalam penyampaian dokumen dokumen laporan	ROO.24.40.7.04	Sekban, kasubag Perencanaan dan keuangan	Kurangnya SDM,	internal/eks ternal	UC	keterlambatan penyampaian laporan keuangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksana	Pelaksanaan	keterlambatan dalam penyampaian dokumen dokumen laporan	ROO.24.40.7.05	sekban Kasubag perencanaan dan keuangan	Kurangnya SDM,	internal/eks ternal	UC	keterlambatan penyampaian laporan keuangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian terlaksana	Pelaksanaan	keterlambatan dalam penyampaian dokumen dokumen laporan	ROO.24.40.7.06	sekban, kasubag umum	kurangnya SDM	internal/eks ternal	UC	Keterlambatan laporan kepegawaian Perangkat daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	Pelaksanaan	kurangnya pelayanan pada kantor	ROO.24.40.7.07	sekban, Kasubag Umum	Kurangnya SDM	internal/eks ternal	UC	keterbatasan pada pelayanan kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang Urusan pemerintah daerah terlaksana	pelaksanaan	Jumlah jasa urusan penunjang urusan Pemerintahan Daerah tidak terlaksana	ROO.24.40.7.08	sekban, kasubag umum	Kurangnya SDM, Kurangnya Anggaran	internal/ eksternal	UC	Penyelenggaraan pelayanan Publik tidak optimal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah terlaksana	Perencanaan	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.24.40.7.09	sekban, Subag umum	Perubahan kebutuhan pemeliharaan berubah sesuai dengan perkembangan di	eksternal	UC	Pemeliharaan kurang optimal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Pelaksanaan	Kurang optimalnya pelaksanaan Kegiatan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	ROO.24.40.7.10	Kepala Bidang Kesbang, Sub Koordinator	Kurangnya SDM dan Kurangnya dukungan anggaran	internal	UC	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai arti penting wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara	ROO.24.40.7.11	Kepala Bidang Kesbang, Sub Koordinator	Kurangnya dukungan anggaran	internal/eks ternal	UC	Penyelenggaraan Pembinaan wawasan kebangsaan tidak sesuai dengan target	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, masyarakat
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	Pelaksanaan	rendahnya partisipasi politik masyarakat di daerah tertentu	ROO.24.40.7.12	Kepala Bidang Poldagri, Sub Koordinator	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat pada saat dilaksanakan di kapanewon Girisubo dan ruang lingkup pelaksanaan Pemilu di Daerah terpencil	internal/eks ternal	C	rendahnya jumlah masyarakat yang memahami pendidikan politik masyarakat dan generasi muda, masyarakat kesulitan akses menuju tempat Pemungutan Suara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, masyarakat
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat	Pelaksanaan	Jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan perencanaan	ROO.24.40.7.13	Kepala Bidang Poldagri, Sub Koordinator	Informasi kegiatan tidak tepat sasaran dan tidak sampai kepada penerima yang semestinya	eksternal	UC	Anggaran tidak terserap sesuai dengan perencanaan	Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	Pelaksanaan	Rendahnya antusias Ormas dalam mengikuti Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	ROO.24.40.7.14	Kepala Bidang Poldagri, Sub Koordinator	Kurangnya dukungan anggaran	internal	UC	Rendahnya peran serta Ormas dalam Pemerintahan dan Pembangunan	Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik, masyarakat
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	Perencanaan	volume jumlah kegiatan yang tidak memadai untuk pemberdayaan seluruh jumlah ormas yang tercatat	ROO.24.40.7.15	Kepala Bidang Poldagri, Sub Koordinator	kurangnya dukungan anggaran	internal	UC	Badan Kesbangpol tidak dapat memberdayakan semua ormas yang tercatat	Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik, masyarakat

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pemahaman masyarakat terhadap Kerukunan Umat Beragama	Pelaksanaan	Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama masih kurang dalam persentasenya	ROO.24.40.7.16	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Sub Koordinator	Kurang optimalnya persentase terkait pemahaman masyarakat mengenai kerukunan umat beragama	eksternal, internal		tidak terlaksananya indikator kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Pelaksanaan	Pembinaan kerukunan umat beragama tidak terlaksana	ROO.24.40.7.17	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Sub Koordinator	Terdapat agenda kegiatan yang padat sehingga menghambat pelaksana	eksternal, internal	C	tidak terlaksananya kegiatan pembinaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	Pelaksanaan	Capaian target konflik sosial yang ditangani dalam wilayah kurang optimal	ROO.24.40.7.18	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Sub Koordinator	belum optimalnya konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	eksternal, internal	C	terganggunya ketentraman dan ketertiban umum	Masyarakat
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	Pelaksanaan	Jumlah fasilitasi perumusan kebijakan teknis penanganan konflik sosial kurang optimal	ROO.24.40.7.19	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Sub Koordinator	Pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis penanganan konflik sosial tidak terlaksana	eksternal, internal	C	Konflik sosial berlangsung dalam jangka waktu lama	Masyarakat

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Hasil Analisis Risiko

Nama Perangkat Daerah Tahun Penilaian Tujuan Strategis				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul 2024 Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat Meningkatnya Ketahanan Masyarakat						
Urusan Pemerintahan										
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi			Analisis Risiko Sebelum Pengendalian			Pengendalian yang telah ada (pengendalian terpasang)	Analisis Risiko pasca pengendalian		
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	d	e	f	g	h	i
1	Risiko Operasional									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kurang pemahaman masyarakat tentang pendidikan wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	ROO.24.40.7.01	3	2	11	Melakukan inovasi kegiatan,	3	2	11
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Peserta yang mengikuti kegiatan kurang tepat sasaran	ROO.24.40.7.02	3	2	11	Melakukan Koordinasi dengan stakeholder	3	2	11
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	keterlambatan dalam penyampaian dokumen dokumen laporan	ROO.24.40.7.03	3	3	14		2	2	7
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	keterlambatan dalam penyampaian dokumen dokumen laporan	ROO.24.40.7.04	3	2	11	Rapat koordinasi, surat perintah, surat edaran	2	2	7
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	keterlambatan dalam penyampaian dokumen dokumen laporan	ROO.24.40.7.05	3	2	11	Koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dengan BKAD	2	2	7
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	keterlambatan dalam penyampaian dokumen dokumen laporan	ROO.24.40.7.06	3	2	11	rapat koordinasi internal	3	2	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kurangnya pelayanan pada kantor	ROO.24.40.7.07	3	2	11	rapat koordinasi internal, pelatihan	3	2	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa urusan penunjang urusan Pemerintahan Daerah tidak terlaksana	ROO.24.40.7.08	3	2	11	belanja sesuai kebutuhan	2	2	7
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.24.40.7.09	3	2	11	belanja sesuai kebutuhan	3	2	11
3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kurang optimalnya pelaksanaan Kegiatan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter	ROO.24.40.7.10	3	2	11	Meningkatkan jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	3	2	11
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai arti penting wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara	ROO.24.40.7.11	2	2	7	Melakukan koordinasi dengan narasumber terkait materi yang akan disampaikan sebelum kegiatan dilaksanakan	2	2	7

4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	rendahnya partisipasi politik masyarakat di daerah tertentu	ROO.24.40.7.12	2	3	10	Pengalihan sasaran kegiatan ke daerah yang tingkat partisipasinya rendah	2	2	7
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan perencanaan	ROO.24.40.7.13	2	3	10	koordinasi dengan Stakeholder untuk memilih peserta yang tepat sasaran	2	2	7
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rendahnya antusias Ormas dalam mengikuti Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	ROO.24.40.7.14	2	3	10	Adanya inovasi kegiatan dengan anggaran yang tersedia	2	2	7
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	volume jumlah kegiatan yang tidak memadai untuk pemberdayaan seluruh jumlah ormas yang tercatat	ROO.24.40.7.15	2	3	10	Penambahan jumlah volume kegiatan	2	2	7
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama masih kurang dalam persentasenya	ROO.24.40.7.16	2	2	7	Melakukan kegiatan pembinaan KUB secara optimal sesuai DPA	2	2	7
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembinaan kerukunan umat beragama tidak terlaksana	ROO.24.40.7.17	3	2	11	Menyusun jadwal kegiatan sesegera mungkin agar dapat mengapling tanggal agenda	2	2	7
7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Capaian target konflik sosial yang ditangani dalam wilayah kurang optimal	ROO.24.40.7.18	3	2	11	Koordinasi yang intensif dengan Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial	2	2	7
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah fasilitasi perumusan kebijakan teknis penanganan konflik sosial kurang optimal	ROO.24.40.7.19	3	3	14	Koordinasi yang lebih intensif dengan Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial agar teknis penanganan konflik sosial lebih optimal	3	2	11
II	Risiko Strategis									
1	Tujuan: Meningkatkan wawasan Kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat									
	Sasaran: 1.1. Meningkatnya ketahanan masyarakat	Capaian target konflik sosial yang ditangani dalam wilayah kurang optimal	RSO.24.40.07.01							

Sasaran: 1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	RSO.24.40.07.02							

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan program/kegiatan

Kolom c diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai sheet 5

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi sebelum adanya pengendalian

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi sebelum ada pengendalian

Kolom f diisi nilai risiko sesuai matriks risiko sebelum ada pengendalian

Kolom g diisi dengan pengendalian yang sudah ada

Kolom h diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi setelah pengendalian terpasang

Kolom i diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi setelah pengendalian terpasang

Kolom j diisi nilai risiko sesuai matriks risiko yang masih tersisa setelah adanya pengendalian terpasang

Rumus Otomatis

Nama Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis	Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masya. akat Meningkatnya Ketahanan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	0

[illegible]

Keterangan

I Risiko Operasional

Data diambil dari Sheet Risk Operasional OPD

Apabila menambah Baris dapat melakukan Insert baris di atas risiko strategis

Rumus dapat ditarik kebawah sesuai kebutuhan

II Risiko Strategis

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Perangkat Daerah		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul						
Tahun Penilaian		2024						
Tujuan Strategis		Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat						
Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Ketahanan Masyarakat						
No	Risiko Prioritas			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko					
a	b		c	d	e	f	g	h
	I Risiko Operasional							
	II Risiko Strategis							